



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 59 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan secara transparan, lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG.

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Desentral (Lemparan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 158, Tampatan Lemparan Negara
Republik Indonesia Nomor 442) sebagaimana telah diubah
kecuali ketika diberikan Undang - Undang Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Kecuali sisa Undang - Undang
Nomor 32 tentang Pemerintahan Desentral (Lemparan Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Lemparan Negara Anvisa Pemerintah Basa' de Gaul
Pemerintahan Desentral (Lemparan Negara Republik Indonesia
Nomor 300 Nomor 158, Tampatan Lemparan
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Aceh (Lemparan Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 52, Tampatan Lemparan Negara
Republik Indonesia Nomor 493);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan dan Peraturan Bantuan
Mineral (Lemparan Negara Republik Indonesia
Nomor 158, Tampatan Lemparan Negara Republik Indonesia
Nomor 442);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 76 Tahun 2002 tentang
Perubahan Lemparan dan Peraturan Bantuan
Pemerintahan Desentral (Lemparan Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 169, Tampatan Lemparan
Republik Indonesia Nomor 4504);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Otonomi Persekutuan Desentral (Lemparan Negara Republik
Indonesia Nomor 3003 Nomor 28, Tampatan Lemparan
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2003
tentang Pengawas Penyeleledaraan Pelaksanaan Tindakan Sanksi
Pajak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2003
tentang Pengawas Penyeleledaraan Pelaksanaan Tindakan Sanksi
Lapangan Saku Jajahan;
14. Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
Desain Kepolisian Republik Indonesia;

MENTUJUSKAN

Wakil kepala : PERINTAHAN SURATI ACEH TAMIMAN
PERINTAHAN SEBAGAIN KEMENANGAN PENYELINGARAN
PERINTAHAN KEBIJAKAN KANTOR PERAYAAN PERINTAHAN
TERPADU SATU HINTU KABUPATEN ACEH TAMIMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Dinas adalah Dinas dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektorat Daerah, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KP2TSP adalah KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Kepala KP2TSP adalah Kepala KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dari Bupati kepada KP2TSP beserta tanggungjawabnya;
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan perizinan;
12. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dengan bentuk izin.

1988
МУНИ МАСТИЕТЭК

15389

Osseous Resection in Lucy and dimple-necked queens

**BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada KP2TSP dan menjadi kewenangannya.

**BAB III
PENANDATANGANAN IZIN**

Pasal 3

- (1) Penandatanganan Izin dilakukan oleh Kepala KP2TSP atas nama Bupati.
- (2) Apabila Kepala KP2TSP berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya.
- (3) Apabila Kepala KP2TSP berhalangan 7 (tujuh) hari atau lebih, maka untuk penandatanganan izin Bupati harus menunjuk pejabat pelaksana harian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila pejabat pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk oleh Bupati, maka penandatangan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penandatangan izin yang dilakukan oleh pejabat Struktural maupun pejabat pelaksana harian atas nama Bupati.

Pasal 4

Kepala KP2TSP dapat melimpahkan penandatanganan izin – izin tertentu kepada pejabat struktural dibawahnya.

**BAB IV
JENIS PERIZINAN**

Pasal 5

Jenis Perizinan yang dilimpahkan kepada KP2TSP terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Pemasangan Reklame
3. Izin Gangguan (HO)
4. Izin Tempat Usaha
5. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8. Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK)
9. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)
10. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
11. Izin Kilang Padi
12. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan
13. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
14. Izin Pendirian Pusat Kebugaran
15. Izin Kesehatan, meliputi :
 - a. Izin Apotik
 - b. Izin Praktek Bersama
 - c. Izin Toko Obat Berizin dan Penjualan Jamu Tradisional

II ЗАЯВЛЕНИЕ

S. Leesq

- (2) **Pantaleon und das Kind** K217B aus mehrjädi *Reuentauendäudya*.
Pantaleon und das Kind beschützen sie selbst von Schädigungen ab.

III БАБ

3 18869

- (f) Penentuan kriteria dan kriteria pengukuran dalam penilaian kinerja kerja dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja.

(g) Apabila kriteria KPTSP berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja.

(h) Apabila kriteria KPTSP berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja.

(i) Apabila kriteria KPTSP berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja.

(j) Apabila kriteria KPTSP berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPTSP atas unsur kinerja kerja.

4 6265

Kepala KPSTSP dapat melihat penindakan berdasarkan ketentuan peraturan teknikal dibawanya.

VI GAS
МАКІЯЖ СІМІ

3 15269

- c. Izin Topo Operasi Bahan api Pertambangan dan Penanaman Tanah Lapisan

d. Izin Ambang Batas Bawah

e. Izin Ambang Batas Atas

f. Izin Pengeluaran dan Dikumpulkan Kepada KPSTB yang di set

- d. Izin Praktek Perawat, Bidan dan Fisioterapi
 - e. Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis
 - f. Izin Praktek Pengobatan Tradisional dan Akupuntur
 - g. Izin Tukang Gigi
 - h. Izin Kesehatan Lingkungan Pemukiman Industri (untuk pengujian secara Fisik UKL – UPL)
 - i. Izin Optik.
16. Izin Hotel dan Losmen
 17. Izin Penjualan dan Penyaluran Obat – Obatan Hewan dan Pertanian
 18. Izin Salon dan Tukang Pangkas
 19. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal.

Pasal 6

- (1) Selain Jenis Perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, Kepala KP2TSP juga dilimpahkan kewenangan untuk menandatangi perizinan tertentu sebagai berikut :
 1. Perizinan untuk Pendirian Hotel
 2. Perizinan untuk Pemasangan Reklame Konstruksi Besar
 3. Perizinan untuk Pendirian Pasar Swalayan
- (2) Sebelum diterbitnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB V PELAKSANA PERIZINAN

Bagian Pertama Tenaga Teknis

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan harus disediakan Tenaga Teknis.
- (2) Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) direkrut dari Instansi Teknis untuk ditempatkan dan menjadi Pegawai difinitif pada KP2TSP.
- (3) Tenaga Tenis sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk memproses permohonan perizinan yang telah dilimpahkan menurut jenis izin masing – masing.

Bagian Kedua Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tim Pembina Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap kewenangan pelayanan perizinan yang dilimpahkan, dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.

- d. izin Praktik Perawat, Bidan dan Fisioterapi
 e. izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis
 f. izin Praktik Pengobatan Tradisional dan Akupunktur
 g. izin Tukang Gigi
 h. izin Kesehatan Lingkungan Penumpukan Industri (untuk berdampak pada Sektor Pertambangan)
 i. izin Objek
 j. izin Hotel dan Posko
 l. izin Penerjemah dan Penyuluhannya Dari -- Organisasi Hewan dan Pemerintahan
 m. izin Gudang dan Tukang Paudeks
 n. izin Perindustrian Tembakau Pendidikan dan Formal

Bab II

- (1) Selain Jenis Perizinan sepedisianan tersebut diatas Basai 5, Kebutuhan KPTSP juga dimungkinkan ketewamanan untuk mendanai berbisnis berikut :
 1. Perizinan untuk Pendirian Hotel
 2. Perizinan untuk Pemasaran Produk Konsumsi Basai
 3. Perizinan untuk Pendirian Pasar Swalayan
 4. Perizinan diperlukan izin sepedisianan dimaksud basai (1) terhadap jasa atau barang yang bersifat bersifat bersifat
 (2)

BAB V

PERANGAN PERIZINAN

Bagian Perizinan
Tatausaha

Bab III

- (1) Untuk sepedisianan ketewamanan yang tidak dilampukai jasa atau dibedakan jenisnya Tatap
 (2) Untuk Teknis sepedisianan tersebut basai (1) dilakukan oleh instansi Tatapis untuk ditetapkan oleh mengisi Basai KPTSP.
 (3) Untuk Tatapis sepedisianan tersebut basai (1) dan basai (2) perlu dilakukan ketewamanan berdasarkan penilaian yang dilampukai menurut
 jasa atau barang yang bersifat bersifat bersifat
 (4)

Bagian Kehutanan
Tim Tatapis

Bab IV

- (1) Pemeliharaan berdasarkan teknologi atau Tim Teknis Asing disusah oleh
 ditetapkan oleh Bupati
 (2) Pemeliharaan, studi, wawancara dan survei berdasarkan Tim Teknis sepedisianan dimaksud basai (1) dilakukan dengan kebutuhan Bupati

Bagian Kehutanan
Tim Pemimpin
Basai 6

- (1) Untuk kebutuhan berdasarkan berpimpinan, evaluasi dan monitori yang dilakukan
 ketewamanan berdasarkan basai (1) dilakukan oleh Kepala Kehutanan Bupati.
 (2) Tim Pemimpin sepedisianas tersebut basai (1) tetapi oleh berdasarkan
 dilengkungkan Pemeliharaan Kapsulasi yang sas kaitnya dengan
 pemeliharaan berdasarkan berpimpinan.

**Bagian Keempat
Prosedur Perizinan**

Pasal 10

Prosedur tetap penyelenggaraan perizinan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenis perizinan yang telah dilimpahkan.

Pasal 11

- (1) Bentuk dan Format Blanko/Formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan dengan ketentuan nama lembaga/ nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala KP2TSP.

**Bagian Kelima
Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin**

Pasal 12

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat – syarat dan jangka waktu pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak dipenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penolakan permohonan izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

**Bagian Keenam
Duplikat dan Pengesahan Salinan Izin**

Pasal 14

- (1) Kepala KP2TSP dapat memberikan Duplikat Izin dan Pengesahan Izin.
- (2) Prosedur dan syarat – syarat untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala KP2TSP.

**Bagian Ketujuh
Target Kinerja**

Pasal 15

- (1) Target kinerja untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) ditetapkan oleh Instansi Teknis berdasarkan jenis izin masing – masing dengan batas waktu satu tahun;

Bagian Rekomendasi
PricewaterhouseCoopers

Pasal 10

Pengembang tetap berhak mendekati pemilik tanah untuk dilaksanakan dengan
kebutuhan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah diatasnya.

Pasal 11

- (1) Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Republik Indonesia
berhak mendekati pemilik tanah untuk dilaksanakan dengan
kebutuhan yang bersifat mendesak namun tidak dapat dilaksanakan
dengan Qisru Kapsitas Akap Tambang
(2) Diketahui oleh bantuan dari pemilik tanah untuk dilaksanakan dengan
berhak mendekati pemilik tanah untuk dilaksanakan dengan
kebutuhan Republik Indonesia.

Bagian Rekomendasi

Pembentukan dan Pengelolaan Perwakilan Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Saya – selaku wakil pemilik tanah untuk dilaksanakan dengan
kebutuhan Diklat.
(2) Saya – selaku wakil pemilik tanah untuk dilaksanakan dengan
kebutuhan Diklat.

Pasal 13

- (1) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan.
(2) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(3) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(4) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(5) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(6) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(7) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(8) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(9) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.
(10) Memperbaiki izin operasi atas dasar perbaikan teknis dan teknologi
dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan teknis dan teknologi.

Bagian Rekomendasi

Dapatkah dan Pada saatnya dilaksanakan izin

Pasal 14

- (1) Kepolisian KUZTB diberi wewenang Diklat pada diri bantuan dan
pada diri selaku – selaku pemilik tanah dilaksanakan izin
berdebasan salinan izin sepadas izin dilaksanakan basa (1) dilaksanakan
dengan izin yang diberikan Kepolisian Kepolisian KUZTB.

Bagian Rekomendasi
Tataletak Kinerja

Pasal 15

- (1) Tataletak kinerja untuk menuntut Paudspel All Darat (PAO) dilaksanakan
oleh instansi Teknis pendidikan jaringan mesin – mesin dengan pasca
pasca tamam jaringan

- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rincian mengenai target kinerja yang harus dicapai KP2TSP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Perencanaan**

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan perizinan yang dilimpahkan dan untuk mencapai target kinerja, KP2TSP bersama Instansi Teknis menyusun perencanaan pelaksanaan pelayanan perizinan secara partisipatif.
- (2) Mekanisme penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), KP2TSP menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dibahas.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Teknis.
- (2) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan staf atau membentuk Tim Teknis.
- (3) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan / atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas dan/atau tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin disampaikan kepada kepala Instansi Teknis yang menugaskannya dan kepada KP2TSP untuk penanganan tindak lanjut.
- (4) Penanganan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memerlukan koordinasi dapat meminta bantuan Tim Teknis.

- (S) Tsiget kinclis sepedisimana dimskana daisit sayl (1) pedeqowen baes
stardesa beleyasnu minuisi den ketututu berindang-undang.
(C) Bulelesan tuncian merungensi tsiget kinclis arau pastu dicsesi KPS18P
dihantupan jajin daisit Kedutusau Bule.

Baesi I
Beloncisanan

Baesi 16

- (I) Dsiam melaikasuku kewunsungan berasaunu berasaunu arau dilimbapina
den nutup merungsai tsiget kinclis KPS18P pedas minuisi Taksis
mawuasun beloncisanan berasaunu berasaunu berasaunu
bahtisibut.
- (S) Makarina beleyasnu tuncian berasaunu berasaunu berasaunu
sepedisimana dimskana basa sayl (1) disipaksa dognan pedeqowen baes
ketututu berindang turndang undang.

Baesi 17

- (I) Dsiaq melaikasuku tuncian berasaunu berasaunu berasaunu
sepedisimana dimskana basa sayl (1), KPS18P merauyanu tuncian
tuddeutan Gajau Ketla Petuleut (spabesi).
- (C) Rendase sudagaran sepedisimana dimskana basa sayl (1) disipaksa
kobas Pasemihin Kapabasi tuluk dipaksa

Baesi IV

PENGAWASAN DAN PEMERINTAHAN

Baesi 18

- (I) Pendawasan taliqas sepedisimana ini sepedisimana dimskana daisit
Basel 8 den Basel 6 sayl (1) disipaksa oleo jantut Taksis.
- (S) instanti Taksis sepedisimana dimskana basa sayl (1) dsiam dilampukon
baudawan qabat merindangtu situl memperintah Tuu Tepi.
- (C) Pendawasan asid pekisan dengen rengatan den a sisa nasis arau titik
mempunayai ini disipaksa oleh Gajau Politi basmondu Petra.

Baesi 19

- (I) Dsiam taliqas pendawasan sepedisimana dimskana basa sayl Basel 18 sayl (1)
duu sayl (2) basa sayl (3) bengas dengen qabat merindangtu tulaas.
- (S) Haili pendawasan ditintingkuu daisit pete sate den disipaksa oleo
bengas dengen tulaas arau titik merindangtu tulaas.
- (C) Haili pendawasan sepedisimana dimskana basa sayl (S) tuluk sumas
toldiesian asid titik seusi dengen ini disipaksa oleo tulaas.
Taksis arau merindangtuas duu kobaas KPS18P unuk berindangnaun tuluk
tuluk.
- Asid merindangtuas duu kobaas KPS18P unuk berindangnaun tuluk
merindangtuas duu kobaas KPS18P unuk berindangnaun tuluk.

Pasal 20

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 21

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar.
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala KP2TSP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1).

BAB VII PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

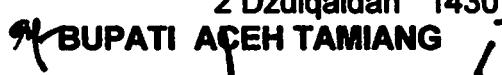
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
21 Oktober 2009 M

Pada tanggal; _____

2 Dzulqaidah 1430 H


BUPATI ACEH TAMIANG

Diundangkan di Karang Baru
21 Oktober 2009 M

Pada Tanggal; _____

2 Dzulqaidah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, *anf*


ABDUL LATIEF


SYAIFUL ANWAR

Baasi 29

Berupintasan dan perkalian dalam operasi kali kegiatan atan usaha atau
diklasifikasi oleh intensitasnya sejauh yang diperlukan.

GAB AIR
PENGUATAN LINTAS

Baasi 31

- (1) Pengelupusan atau dilipatgantung pada:
a. Dokumen berdasarkan dan distribusi desain bentangan atau teknologi
disk penit
b. Lekasai berlindung dari perubahan dan teknologi
c. Dalam sifat ketahanan berdasarkan bentangan – umur
d. Pengelupusan atau sepadas dimulai pada saat (1) dilaksanakan oleh
kepala KPTSP dengan mendeklarasikan keputusan Pengelupusan
(2) Pengelupusan sepadas dimulai ditandakn bersama dengan pada saat (1) dilaksanakan selesa
menyebabkan bergeraknya titik lokasi sepadas dimulai bersama dengan pada saat (1).
menyebabkan bergeraknya titik lokasi sepadas dimulai bersama dengan pada saat (1).

GAB AIR
PENGUATAN

Baasi 32

Hil – hil dan pertumbuhan dalam batuan ini sebagian besar merupakan batuan
berpasir dengan pasir silika yang masih belum berpasiran dengan pasir silika yang
berpasiran dengan pasir silika yang masih belum berpasiran dengan pasir silika yang

Baasi 33

Dalam penerapan Petunjuk Baasi ini, maka sebagai ketuntuan agar
pertumbuhan dalam Petunjuk Baasi ini diwujudkan diskripsi.

Baasi 34

Pertumbuhan Baasi ini untuk petunjuk pada fungsi dinamisik.
Asal sumber air yang mendekatinya, pemeliharaannya, penggunaannya Petunjuk
Baasi ini dalam bentuk sistematis dan teknologi Desain Kapabilitas Acara
Lambang

Dilengkapi di Karang Baru

21 Oktober 2008 M

Batas tengah

2 Desember 1430 H

„DURAI ACEH TRAINING“

ABDI LATIFAH

Dilengkapi di Karang Baru

21 Oktober 2008 M

Batas Tengah

2 Desember 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

„KADILAKAN ACEH TRAINING“

STYLISH ANWAR